



# RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SERTA PERTANAHAN

- DPRKPP -

TAHUN 2024

KOTA TARA KAN

2024

## Daftar Isi

Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	67
BAB V PENUTUP .....	68

## Daftar Tabel

<b>Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Tarakan .....</b>	<b>10</b>
<b>Tabel 2.Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan .....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 3.Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Tarakan .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 4.Rekapitulasi Usulan Masyarakat Tahun 2024.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Tarakan.....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 6. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Nasional .....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Tarakan .....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 8. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan DPRKPP Kota Tarakan Tahun 2024 .....</b>	<b>68</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) PD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja PD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan di tahun kedua perencanaan strategis (Renstra 2019-2024). Pedoman Penyusunan Renja dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang penyusunannya mengacu pada :

1. Tingkat keberhasilan capaian kinerja indikator Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka perwujudan keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah Kota Tarakan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024.

2. Rencana kerja dan evaluasi atas tingkat capaian indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Startegis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2021.
3. Usulan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tarakan (Musrenbang)

Hubungan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD dan Renstra adalah RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis, mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah. Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan 5 (lima) tahunan (Renstra) selanjutnya dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja)
2. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) SKPD. RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran.
3. Selanjutnya RKA SKPD ini akan menjadi dasar dalam ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA. DPA merupakan dasar dari penentuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

#### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
20. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan tahun 2022.

#### 1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dimana dijadikan



acuan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah :

1. Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.
2. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)
5. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA TARAKAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN TAHUN 2022

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu Ranwal Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Tarakan juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Ranwal Renja DPRKPP Kota Tarakan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan

Penyusunan Ranwal Renja DPRKPP Kota Tarakan memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b) Tujuan yang dikehendaki;
- c) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja DPRKPP Kota Tarakan juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b) Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Ranwal Renja DPRKPP Kota Tarakan dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

**Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Tarakan**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan/ Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		
		Target	Satuan	Target	Satuan	Target Renja PD Tahun 2022		Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
						Target	Satuan					Realisasi	Satuan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan capaian kinerja Renja & Renstra	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	100	2 Layanan	2 Layanan	100				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan tunjangan administrasi keuangan serta Ketersediaan honor Pegawai Non PNS	56 Orang	56 Orang	56 Orang	56 Orang	100	56 Orang	56 Orang	100				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	26 Orang	12 Bulan	26 Orang	26 Orang	100	26 Orang	26 Orang	100				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	70 set	44 Orang				41 stel	41 stel	100				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	5 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	100	4 Layanan	4 Layanan	100				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Komponen	8 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	5 Jenis	100				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor						-	-					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat dan bahan logistik yang tersedia	86 Jenis	50 Jenis	86 Jenis	70 Jenis	81,40	86 Jenis	70 Jenis	81,40				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	100,00				

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
		Target      Satuan	Target      Satuan	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target      Satuan	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target      Satuan	Realisasi      Satuan			Realisasi      Satuan	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	2 Layanan	3 Layanan	2 Layanan	66,67	3 Layanan	2 Layanan	66,67
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1 Jenis	100 Lembar	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan/rahabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan/rahabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi	100 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab	100 Persen	4 unit	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	100 Persen	3 unit	100 Persen	100,00 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penghunian rumah khusus	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
	Persentase penghunian unit kamar rusunawa	43,43 Persen	Persen	38,38 Persen	41,92 Persen	109	40,91 Persen	40,91 Persen	100
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah fasilitas pendukung pengelolaan kelembagaan dan pemilik / penghuni rumah susun	20 Jenis	15 Jenis	20 Jenis	15 Jenis	75	20 Jenis	15 Jenis	75

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan/ Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
		Target	Satuan	Target	Satuan	Target Renja PD Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
						Target	Satuan				Realisasi	Satuan	Realisasi	Satuan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	6,87 Persen	34,41 Persen	31,74 Persen	31,77 Persen	99	17,64 Persen	17,64 Persen						
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terdatanya kawasan kumuh Kota Tarakan	100 Persen	Persen	100,00 Persen	100,00 Persen	100	100,00 Persen	100,00 Persen	100					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Kegiatan		1 Kegiatan	0,97 Kegiatan	97,00	1 Kegiatan	1,00 Kegiatan	100					
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata	75,00 Persen		25,00 Persen	24,03 Persen	96,12	50,00 Persen	50,00 Persen	100					
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100					
Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100					
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)	4,42 Ha	Ha	5,34 Ha	13,36 Ha	250	7,45 Ha	7,45 Ha	100					
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang ter-Rehabilitasi di kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						-	-						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Kegiatan	52 unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1,00 Kegiatan	1,00 Kegiatan	100					
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	100 Persen	51,35 Persen	60,00 Persen	66,52 Persen	111	80,00 Persen	80,00 Persen	100					
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang terfasilitasi	250 Unit	211 Unit	250 Unit	270 Unit	108	250,00 Unit	250,00 Unit	100					
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah unit RTLH yang direhab	50 Unit Rumah	52 Unit Rumah	50 Unit Ruma	50 Unit Rumah	100	50,00 Unit Rumah	50,00 Unit Rumah	100					
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	100 Persen	100 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen	100	100,00 Persen	100,00 Persen	100					
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	100 Persen	83,30 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen	100	100,00 Persen	100,00 Persen	100					
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	2 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100					
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah ketersediaan PSU yang menunjang fungsi hunian (meter)	4,400 Meter	300 Kegiatan	2,200 Meter	30,331 Meter	1,379	4.400 Meter	30 Meter	682					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
		Target      Satuan	Target      Satuan	Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target      Satuan	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target      Satuan	Realisasi      Satuan			Realisasi      Satuan	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								-	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>								-	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 Persen	22,22 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen	100	100,00 Persen	100,00 Persen	100
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	100 Persen	22,22 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen	100	100,00 Persen	100,00 Persen	100
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 Persen	22,22 Persen	100 Persen	50 Persen	50	100,00 Persen	100,00 Persen	100
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100 Persen		100,00 Persen	100,00 Persen	100	100,00 Persen	100,00 Persen	100
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan	100 Persen		100,00 Persen	100,00 Persen	100	100,00 Persen	100,00 Persen	100
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima santunan tanah yang terdaftar	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100,00 Persen	100,00 Persen	100
Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen SPL yang tertata	100 Persen	100 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen	100	100,00 Persen	100,00 Persen	100
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100 Persen	10 lokasi	100,00 Persen	100,00 Persen	100	100,00 Persen	100,00 Persen	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	1 Kegiatan	10 lokasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1,00 Kegiatan	1,00 Kegiatan	100

Sumber Data : Matriks Ranwal Renja DPRKPP 2023



Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan tahun lalu (tahun 2022) dilakukan terhadap semua program dan kegiatan serta sub kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022, target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050/5889 Tahun 2021. Komponen indikator kinerja kegiatan meliputi indikator input, output dan outcome sementara indikator kinerja sasaran meliputi indikator output atau outcome dari kegiatan nyata yang mendukung keberhasilan sasaran yang bersangkutan.

Capaian realisasi kinerja program/kegiatan di tahun 2022 terbagi menjadi 2 kategori capaian yaitu mencapai target dan tidak mencapai target. Adapun Program/kegiatan yang mencapai target realisasi Fisik Program/kegiatan/subkegiatan antara lain:

- A. Program / kegiatan/ Sub kegiatan yang mencapai target Realisasi Kinerja Program/kegiatan/Subkegiatan yang direncanakan dalam Renja yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
    - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan, Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

## 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- Subkegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

## 4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

- Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Penatagunaan Tanah

- Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Program/Kegiatan/Subkegiatan tersebut dapat memenuhi target realisasi kinerja 100% seperti yang sudah direncanakan.

B. Program/kegiatan yang tidak mencapai target Realisasi kinerja Program/kegiatan yang direncanakan antara lain:

1. Program Kawasan Permukiman

Terealisasi sebesar 31,77% dari target sebesar 31,74% realisasi penurunan permukiman kumuh sebesar 99,86% dikarenakan beberapa titik lokasi RT di Kelurahan permukiman kumuh belum memenuhi 7 aspek kriteria perhitungan penanganan kumuh. Adapun 7 aspek tersebut adalah (a). Aspek kondisi bangunan gedung, (b) kondisi jalan lingkungan (c) kondisi penyediaan air

minum (d) kondisi drainase lingkungan (e) kondisi pengelolaan air limbah (f) kondisi pengelolaan persampahan (g) kondisi proteksi kebakaran dari 7 aspek tersebut terdapat beberapa dinas pengampu antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP). Adapun dari 7 aspek tersebut 2 aspek yang diampu DPRKPP yaitu aspek (1) aspek kondisi bangunan gedung dan aspek (2) kondisi jalan lingkungan adapun kegiatannya adalah:

- a) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- b) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
- c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

C. Program/kegiatan yang melebihi target Realisasi fisik Program/kegiatan yang direncanakan antara lain:

1. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Terealisasi sebesar 66,52% dengan target sebesar 60% sehingga capaiannya sebesar 110,87% dengan kategori melebihi target Realisasi kinerja yang sudah direncanakan, Hal ini dikarenakan adanya dukungan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Satker Kementerian PUPR (APBN) dan APBD Propinsi sehingga membantu Pemerintah Daerah Kota Tarakan mengurangi jumlah RTLH yang berpengaruh terhadap capaian kinerja pengurangan RTLH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan. Kegiatan yang dilaksanakan

meliputi: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Berdasarkan Renstra 2019-2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan di tahun 2022 memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU), 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan 2 (dua) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja DPRKPP 2024, hasil analisis pencapaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan**

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi 2022	Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024		2023	2024	
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum serta Tertib Administrasi Pertanahan	%			100,00	100,00	100,00	100,00	78,21	100,00	100,00	<p>- Nomenklatur dan cara perhitungan pada indikator ke 2 s/d 8 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPP yang tertuang dalam Renstra Perubahan DPRKPP TA 2019-2024, untuk indikator ke 9 s/d 19 merupakan IKK output dari LPPD DPRKPP, dan indikator ke 20 dan 21 merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat.</p> <p>- Realisasi Capaian Tahun 2022 memakai data Realisasi Capaian Status TW IV Tahun 2022</p> <p>- Proyeksi realisasi Tahun 2023 dan 2024 diperkirakan sama dengan Target Tahun tersebut hanya berubah di target NILAI SAKIP dari 64/B menjadi 70/BB dengan pertimbangan segala faktor pendukung kegiatan tidak mengalami perubahan secara signifikan, dan target penyelesaian sengketa tanah dari 100% menjadi 80% dengan pertimbangan trend penyelesaian sengketa 3 tahun sebelumnya.</p>
2	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	%			40,00	60,00	80,00	100,00	66,52	80,00	100,00	
3	Persentase luas kawasan kumuh	%			49,17	31,74	17,64	6,87	31,77	17,64	6,87	
4	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
5	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	%			100,00	100,00	100,00	100,00	50	100,00	100,00	
6	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
7	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
8	NILAI SAKIP	Nilai			64,00	64,00	64,00	64,00	74,23	70,00	70,00	
9	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%		√	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
10	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%		√	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
11	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%		√	19,00	25,00	35,00	21,00	24,03	35,00	21,00	

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
12	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%		√	3,07	2,17	1,37	0,65	1,06	1,37	0,65	
13	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%		√	51,99	68,94	83,06	100,00	66,56	83,06	100,00	
14	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%		√	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
15	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%		√	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
16	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%		√	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
17	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%		√	18,00	18,00	18,00	18,00	100	18,00	18,00	
18	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%		√	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
19	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%		√	80,00	80,00	80,00	80,00	50,00	80,00	80,00	
20	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	√		100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	
21	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	√		100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	

Sumber Data : Data diolah DPRKPP 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan SPM yang mencapai 100% meliputi Indikator:
  - a. Persentase PSU yang ditingkatkan.
  - b. Persentase Ganti Kerugian dan atau Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan
  - c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
  - d. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
  - e. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum
  - f. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal
  - g. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
  - h. Tersedianya tanah untuk masyarakat
  - i. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
  - j. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)
2. Realisasi Indikator Persentase Rumah MBR yang terbangun dan terenovasi sebesar 66,56% melebihi target Renstra 2019-2022 yaitu 60%, hal ini disebabkan karena adanya bantuan perbaikan RTLH dari Satker Kementrian PUPR sebesar 120 unit.



3. Realisasi Indikator Luas Kawasan Kumuh mencapai 31,77% dari target 31,74%, hal ini dikarenakan beberapa titik lokasi RT di Kelurahan permukiman kumuh belum memenuhi 7 aspek kriteria perhitungan penanganan kumuh sehingga perlunya adanya intervensi kegiatan di titik-titik RT permukiman kumuh di Kota Tarakan.
4. Realisasi Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan sebesar 50% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 50%.
5. Realisasi Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani sebesar 24,52 Ha dari luas kumuh sebesar 50,34 Ha, dengan sisa luasan kumuh tahun 2022 sebesar 25,82 Ha
6. Realisasi Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebesar tahun 2021 sebesar 1119 sisa RTLH dan pada tahun 2022 sebesar 770 unit rumah sisa RTLH.
7. Realisasi Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 20 Perumahan.
8. Realisasi Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi sebesar 7 kasus sengketa.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan antara lain:

a). Anggaran

Salah satu aspek dalam pencapaian target kinerja adalah ketersediaan anggaran. Perencanaan yang telah disusun dengan baik apabila tidak didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup, maka pelaksanaannya tidak akan optimal. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

serta Pertanahan Kota Tarakan belum memiliki anggaran yang proposional dalam mengatasi permasalahan terkait penanganan kumuh dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.

b) Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidangnya

Jumlah pegawai yang kompeten di bidangnya masih kurang mengakomodir untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga diperlukan rekrutmen pegawai berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

c). Sarana dan prasarana yang belum optimal.

Sarana dan prasarana yang masih belum optimal saat ini menjadi kendala bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan diantaranya adalah:

a) Tantangan

Tantangan dalam pelaksanaan tugas dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh.

2. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau illegal.
3. Belum optimalnya penataan permukiman kumuh
4. Perlu sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

b) Peluang

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan perlu memanfaatkan peluang sebagai berikut:

1. Terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dari pengembang perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau/Taman.
2. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
3. Tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Semakin kritis dan proaktif-nya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

6. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.
7. Adanya prioritas nasional dalam mengurangi kawasan kumuh menjadi nol persen membuka peluang bagi Pemerintah Kota Tarakan untuk mendapatkan bantuan peningkatan kapasitas SDM dan dana dalam penataan kawasan pemukiman kumuh.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
berisikan uraian mengenai:

Beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pembiayaan

Guna pemenuhan kebutuhan pembiayaan maka perlu dilakukan upaya meningkatkan alokasi anggaran perangkat daerah melalui alternatif pembiayaan lainnya selain melalui APBD dengan menjajaki kemungkinan pembiayaan melalui program DAK, Dana hibah Provinsi ataupun bantuan keuangan dari Pemerintah daerah lainnya.

2. Masalah Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh  
Sesuai aturan kumuh Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Serta Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

3. Masalah Pemenuhan kebutuhan PSU Perumahan dan permukiman, antara lain:

- a) Masih terdapatnya lingkungan permukiman yang belum didukung dengan PSU yang memadai. Keterbatasan lahan menjadi salah satu penyebabnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya penarikan PSU secara sepihak maupun dengan cara.
- b) Masih belum terpenuhinya kebutuhan PSU perumahan yang inklusif (ramah difabel dan lansia)

4. Masalah Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.

Belum tersedianya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka perlu segera dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana
- b) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
- c) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.
- d) Rehabilitasi dan atau pembangunan Rumah bagi korban bencana

Dalam mengatasi isu-isu penting dan permasalahan di atas, DPRKPP Kota Tarakan telah melaksanakan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan OPD lintas sektoral, Satker Kementerian PUPR dan Kementerian ATR,

melalui Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renja DPRKPP Kota Tarakan Tahun 2024. Selain melalui kegiatan Rakor dan Forum OPD tersebut, koordinasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Musrenbang Kota. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dihubungkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024 serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan Kawasan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan terkait erat dengan pencapaian ***Misi ke-3 yaitu Meningkatkan dan mempercepat Pembangunan Infrastruktur Publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan dan Misi ke-2 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.***

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD / Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Tarakan****Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan				
	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			28.585.449.000				7.845.810.777	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	5.963.794.833	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	%	6.425.835.127	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	5.000.000	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	1	Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	5.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	5.422.000.000	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2	layanan	5.643.887.947	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/bulan	4.982.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	orang/Bulan	5.243.887.947	



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan				
	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56 Dokumen	440.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27	Dokumen	400.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan kepegawaian	1 layanan	40.000.000	Jumlah layanan kepegawaian	0	layanan	0	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	40.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 layanan	115.000.000	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	layanan	107.957.180	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	3.996.960	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	33.010.720	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86 Paket	25.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86	Paket	39.999.050	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	5.999.650	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan				
	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	Laporan	24.950.800	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 layanan	173.000.000	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2	layanan	259.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	256.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan	0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	15 Unit	208.794.833	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	32	Unit	409.990.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	13.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	50.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan/rahabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	3 kegiatan	165.794.833	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	250.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan				
	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 kegiatan	30.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	109.990.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi	100%	140.000.000	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi	100	%	139.999.640	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab	100%	100.000.000	Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab	100	%	99.999.640	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	20 unit	100.000.000	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitas	10	unit	99.999.640	
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penghunian rumah khusus (%)	100%	40.000.000	Persentase penghunian rumah khusus (%)	100	%	40.000.000	
	Persentase penghunian unit kamar rusunawa	43,43%		Persentase penghunian unit kamar rusunawa	43,43	%		
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah fasilitas pendukung pengelolaan kelembagaan dan pemilik / penghuni rumah susun	20 Laporan	40.000.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	20	Laporan	40.000.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	6.87 %	1.405.000.000	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	6,87	%	254.999.860	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan				
	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	100 %	200.000.000	Persentase ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	0	%	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	200.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	0	Laporan	0	
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	200.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	0	Dokumen	0	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata	50 %	5.000.000	persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata	50	%	155.000.000	
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	5.000.000	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	5.000.000	
				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	150.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan				
	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)	4.42 Ha	1.200.000.000	Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)	4,42	Ha	99.999.860	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	1.100.000.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0	unit rumah	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	Laporan	0	
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	25,82 Ha	100.000.000	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	8.93	Ha	99.999.860	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	100 %	1.200.000.000	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	100	%	999.999.850	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang terfasilitasi	250 Unit	1.200.000.000	Jumlah RTLH yang terfasilitasi	250	Unit	999.999.850	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan				
	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	1.200.000.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	45	Unit Rumah	999.999.850	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	100 %	19.876.654.167	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	100	%	24.976.300	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	100 %	19.876.654.167	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	100	%	24.976.300	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	0	Dokumen	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	0	Laporan	0	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 Lokasi	19.776.654.167	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0	Lokasi	0	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan				
	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang				Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	Laporan	24.976.300	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			3.250.000.000				4.499.989.800	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	30.000.000	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	%	29.990.000	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	30.000.000	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	100	%	29.990.000	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	30.000.000	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Berita Acara	29.990.000	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100 persen	3.200.000.000	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100	persen	4.450.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan				
	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100 %	3.200.000.000	Persentase penerima ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan	100	%	4.450.000.000	
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	3 Dokumen	3.200.000.000	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	3	Dokumen	4.450.000.000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100 persen	20.000.000	Cakupan dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100	persen	19.999.800	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Presentase dokumen SPL yang ditindalanjuti	100 %	20.000.000	Presentase dokumen SPL yang ditindalanjuti	100	%	19.999.800	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	Laporan	19.999.800	
			31.835.449.000				12.345.800.577	

Sumber Data : Data Diolah DPRKPP 2023



Pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) pada Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2024 dan berdasarkan Dokumen Renstra DPRKPP Tahun 2024 sebesar Rp 31.835.449.000,- . Setelah dilakukan analisa terhadap kebutuhan anggaran maka terdapat penyesuaian anggaran pada:

1. Penyesuaian Perhitungan pada Sub Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN bertambah dari pagu ranwal sebesar Rp. 261.887.947,-,hal ini disebabkan adanya PNS yang naik pangkat dan kenaikan golongan.
2. Pergeseran anggaran pada Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 14.350.000,- untuk Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Pengadaan Komputer Bidang Pertanahan.
3. Penyesuaian pada Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari pagu ranwal bertambah senilai Rp. 14.999.050,-
4. Penyesuain anggaran Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berkurang menjadi Rp. 24.950.800,-
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bertambah senilai Rp.96.000.000,- dari pagu ranwal disebabkan adanya prediksi kenaikan Tarif Listrik, Air di Rusunawa.
6. Penyesuaian anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan senilai Rp. 37.000.000,- dikarenakan penyesuaian harga bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor.
7. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Rusunawa dan Rusus senilai Rp. 250.000.000,- ,

melebihi pagu ranwal yaitu Rp. 165.794.833,-.dikarenakan adanya kebutuhan pemeliharaan Rusus baru yaitu Rusus Juata Permai.

8. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya bertambah sebesar Rp. 79.999.000,- untuk pemeliharaan computer, AC dan printer Kantor
9. Perubahan Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh menjadi Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan alasan penyesuaian indikator yang lebih tepat sasaran pada PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
10. Perubahan Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh menjadi Subkegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, dengan alasan penyesuaian indikator menjadi Hektar (Ha) pada PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
11. Efisiensi anggaran Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha turun menjadi Rp. 999.999,850,-.
12. Perubahan Subkegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan menjadi Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan pada PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

13. Penyesuaian anggaran Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang naik menjadi Rp. 4.450.000.000,- dari Rp. 3.200.000.000,- berdasarkan prediksi cicilan pembayaran Utang Pengadaan Lahan.

Dengan demikian Pagu Anggaran Ranwal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2024 menjadi Rp. 12.345.800.577,-. Penurunan pagu ranwal ini disebabkan karena Anggaran untuk Usulan Musrenbang dan Pokir Dewan belum termasuk didalamnya.

Pagu pada program-program yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) beberapa mengalami perbedaan yang signifikan, yaitu pada program-program dibawah ini:

1. Program Kawasan Permukiman mengalami penurunan yang signifikan dari Rp. 1.405.000.000,- menjadi Rp.254.999.860,- , hal ini disebabkan oleh perubahan dan perpindahan nomenklatur sub-kegiatan yang sebelumnya ada di Program Kawasan permukiman berpindah ke Program Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh. Awalnya dari sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha. Perubahan ini disebabkan adanya penyesuaian indikator pada nomenklatur sub-kegiatan.
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mengalami penurunan pagu dari Rp.1.200.000.000,- menjadi Rp. 999.999.850,-, hal ini disebabkan

karena penyesuaian target kegiatan bedah rumah yang awalnya 50 unit rumah menjadi 45 unit rumah.

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mengalami penurunan yang signifikan dari Rp. 19.876.654.167,- menjadi Rp. 24.976.300,-. Disebabkan oleh usulan musrenbang dan pokir belum terakomodir hingga dokumen ini diselesaikan.
4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan mengalami kenaikan pagu dari Rp. 3.250.000.000,- menjadi Rp. 4.499.989.800,-. Disebabkan adanya kebijakan Kepala Daerah dalam menentukan alokasi anggaran untuk pelunasan utang pembebasan tanah sesuai dengan Daftar Utang yang telah diverifikasi oleh BPK.

## 2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat Tahun 2024 yang masuk melalui Forum Musrenbang di Tahun 2023 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan melalui Kegiatan/Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian adalah sebanyak 460 usulan yang tersebar di seluruh RT di Kota Tarakan. Dari usulan tersebut DPRKPP hanya dapat mengakomodir sebanyak 219 usulan dengan pertimbangan antara lain kondisi Jalan Lingkungan yang rusak berat dan memenuhi syarat untuk diperbaiki sebagai prioritas ke-1.

Usulan Masyarakat pada Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha atau Program Bedah Rumah sebanyak 100 usulan dan semua usulan diakomodir oleh DPRKPP.

Lokasi RT (Rukun Tetangga) yang mengusulkan Kegiatan Bedah Rumah dan Peningkatan Jalan Lingkungan yang tersebar di Kota Tarakan melalui usulan Dana RT (Musrenbang) dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :

**Tabel 4 . Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Tarakan****Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanian**

<b>NO</b>	<b>USULAN</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ALAMAT LOKASI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUBKEGIATAN</b>	<b>PILIH</b>
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Pembuatan semenisasi (Rp.50.000.000,-)	Jl. Sebengkok Gang 45 RT.32, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Pembuatan semenisasi (Rp.50.000.000)	Jl. Sebengkok RT.34 , Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Pembuatan jembatan kecil (menyeberangi parit maksimal 3 m)	Pembuatan Jembatan (Rp.50.000.000,-)	Jl. Sebengkok RT.19 Gang Halman, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	pembuatan semenisasi (Rp.50.000.000,-)	Jl. Kamp.1 Skip, RT.06, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Pembuatan semenisasi (Rp.50.000.000,-)	Sebengkok RT.18, Gang Bata, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Pembuatan Semenisasi (Rp.50.000.000,-)	Sebengkok RT.29, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Pembuatan Semenisasi (Rp.50.000.000,-)	Selumit Pantai RT.10, Belakang Toko, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Semenisasi (Rp. 50.000.000)	Sebengkok RT.13, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Semenisasi (RT.50.000.000)	Sebengkok RT.21, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Semenisasi lama sudah hancur. Rp. 50.000.000	Jl. Matahari masuk gang RT 63 Kel. Karang Anyar Kec, Tarakan Barat, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Semenisasi Tahap II (Rp. 50.000.000)	Jl. Flamboyan masuk Gang RT 28 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000

1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Semenisasi uk 20.00 m3 Rp. 50.000.000,-	Gang Anggrek ujung, Daniel Sendana ( Simon Parintak ) Rt... Kp. Baru Kel. Pamusian Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Semenisasi, Rp. 50.000.000	Gang Anggrek Ujung RT 28 Kel. Pamusian, Kec. tarakan Tengah, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Semenisasi uk 20.00 m3 Rp. 50.000.000,-	Jl. Purna Bhakti Gang Bismillah ( Abdul Muhi/Simon P ) Rt. 06 Kp. Satu Skip Kel. Kmp.1. Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Semenisasi, Rp. 200.000.000	Jl. Juata Permai RT 21, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	200.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	semenisasi Rp. 50.000.000,-	RT 6 Gang Bismillah Kp.1 Skip, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	semenisasi Rp. 50.000.000,-	RT 6 Gg.Rajawali Tarakan, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	semenisasi (Rp. 50.000.000,-)	RT 28 Gg.Anggrek Tarakan, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Semenisasi uk 228.00 m3 Rp. 50.000.000,-	Jl. Mangkudulis Rt. 15 Samping Rumah Pak Hj. Naat Kp. Satu/ Skip Kel. Kamp 1 Kec Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Semenisasi uk 24.00 Rp. 50.000.000,-	Rt. 9 Samping Masjid Kp. 1/Skip Kel. Ke. Tarakan tengah, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
1	Semenisasi (lebar maksimal 3 m)	Semenisasi uk 22,20 m3 Rp. 50.000.000,-	Samping Rumah Agus/Tibe Rt. 58 Kel. Kr, Anyar Kec. Tarakan barat, Kota Tarakan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000
<b>241</b>						<b>JUMLAH</b>	<b>20.520.000.000</b>

Sumber Data : SIPD Kota Tarakan 2023 (Data ditampilkan Sebagian)

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

**1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.**

Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman termaktub dalam pasal-pasal :

- Bab II.2 Huruf D 5 yakni memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.
- Bab IV.1.5. Butir 19 yakni pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat.

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan dalam Undang - Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal,



menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan

3. Pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

**5. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu : Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 diantaranya :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa
- c. Teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- d. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
- e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap

pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.

#### **6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan Ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik

Selain mengacu pada Kebijakan Nasional diatas, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Nasional

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS	
							NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.518.863.957,00			
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			39.518.863.957,00			
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.648.887.947,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)	100				
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja (Dokumen)	1				
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.000.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1				
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.643.887.947,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu (Layanan)	2				
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.243.887.947,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46				
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			400.000.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	27				
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			254.999.860,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

			<b>Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)</b>	<b>6,87</b>				<b>Permukiman serta Pertanahan</b>
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata (%)</i>	75	155.000.000,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)</i>	1	150.000.000,00		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	<i>Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)</i>	1	5.000.000,00		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)</i>	4,42	99.999.860,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	<i>Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)</i>	8,93	99.999.860,00		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
<b>4.</b>	<b>1.04.04</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>			<b>2.119.999.850,00</b>			<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan</b>
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah RTLH yang terfasilitasi (Unit)</i>	250	2.119.999.850,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)</i>	100	2.119.999.850,00		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
<b>5.</b>	<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			<b>31.494.976.300,00</b>			<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan</b>

			<b>Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan (%)</b>	<b>100</b>				<b>Permukiman serta Pertanahan</b>
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			31.494.976.300,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			<i>Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun (%)</i>	<b>100</b>				
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			31.470.000.000,00		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)</i>	<b>460</b>				
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			24.976.300,00		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			<i>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang(Laporan)</i>	<b>1</b>				
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>4.499.989.800,00</b>			
	<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>			<b>4.499.989.800,00</b>			
<b>1.</b>	<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>			<b>29.990.000,00</b>			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			<i>Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)</i>	<b>100</b>				
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			29.990.000,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			<i>Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan (%)</i>	<b>100</b>				
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			29.990.000,00		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara )</i>	<b>5</b>				
<b>2.</b>	<b>2.10.05</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>			<b>4.450.000.000,00</b>			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			<i>Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan (%)</i>	<b>100</b>				
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.450.000.000,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

			Persentase penerima ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan (%)	100				Permukiman serta Pertanian
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.450.000.000,00		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	3				
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			19.999.800,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian
			Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti (%)	100				
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			19.999.800,00			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian
			Presentase dokumen SPL yang ditindalanjuti (%)	100				
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			19.999.800,00		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota(Laporan)	5				
	J U M L A H				44.018.853.757,00			

Sumber Data : SIPD Kota Tarakan 2023

Sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJM Nasional, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Program/ Kegiatan/SubKegiatan DPRKPP Kota Tarakan mendukung 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, didukung oleh 1 (satu) Program saja yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, didukung oleh Program berikut ini:
  1. Program kawasan permukiman
  2. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
  3. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)
  4. Program penyelesaian sengketa tanah garapan
  5. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
  6. Program penatagunaan tanah

Pagu Anggaran Program Prioritas DPRKPP Tahun 2024 yang mendukung Prioritas Nasional sebesar Rp. 23.398.853.757,- .

### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan, tujuan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan tahun 2024 berdasarkan renstra revisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan 2019-2024 memiliki tujuan yaitu:

“Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Lingkungan yang Merata dan Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Tarakan”

Sedangkan sasaran renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR
2. Menurunnya luas kawasan kumuh
3. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Tahun 2024 mencakup 8 Program, 14 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan



Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau

Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
  3. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
    1. Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
      - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
  4. Program Kawasan Permukiman
    1. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
      - Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
      - Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
    2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
  5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
    1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
      - Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
6. Program Penatagunaan Tanah
    1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
    1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
    1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Namun seiring dengan adanya Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kemendagri di Tahun 2023 ini yang dituangkan dalam Kepmendagri 050-5889 v2, terdapat Perubahan Sub Kegiatan serta indikatornya sebagai berikut:

Program/Kegiatan/SubKegiatan Pilihan Sebelum Pemutakhiran	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan Pilihan Setelah Pemutakhiran	Indikator
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi

Sumber Data: Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889 Tahun 2023

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 7 Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2024 Kota Tarakan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Tarakan  
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.467.810.777,00					0,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			40.467.810.777,00					0,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.457.835.127,00					0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)	100							
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja (Dokumen)	1		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0.00		
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.643.887.947,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

		Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu (Layanan)	2		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.243.887.947,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			400.000.000,00			Aparatur		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	27		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0.00		
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			139.957.180,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana(Layanan)	5		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.996.960,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			65.010.720,00			Aparatur		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0		
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			39.999.050,00			Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	86		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0		
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.999.650,00			Aparatur		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	0		
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24.950.800,00			Aparatur		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	0		
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			259.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia (Layanan)	2		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			256.000.000,00			Aparatur		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	0		
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			409.990.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

			Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara (Unit)	32		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		Permukiman serta Pertanahan
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000,00			Aparatur		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		(RT 27 Pamusian, Pamusian, Kec. Tarakan Tengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0		
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			109.990.000,00			Masyarakat		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	0		
2.	1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>			<b>139.999.640,00</b>					<b>0,00</b>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			<b>Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi (%)</b>	<b>100</b>				<b>Aparatur</b>			
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			99.999.640,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab (%)	100		(Wilayah Terdampak, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			99.999.640,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10		(Daerah Tersebar, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		Permukiman serta Pertanahan
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			40.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase penghunian rumah khusus (%)	100		(RT.27 Pamusian, Pamusian, Kec. Tarakan Tengah)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
			Persentase penghunian unit kamar rusunawa (%)	43,43		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun			40.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	20		(RT.27 Pamusian, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			254.999.860,00			Masyarakat		0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	6,87							
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			155.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata (%)	75		(Lokasi Kumuh Kota Tarakan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			150.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Terlegalisasi (Dokumen)	1		(Lokasi Kumuh Kota Tarakan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		

	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			5.000.000,00			Masyarakat		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1		(Lokasi Kumuh Kota Tarakan, KOTA TARA KAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	0		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			99.999.860,00				0	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)	4,42		(Lokasi Kumuh Kota Tarakan, KOTA TARA KAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			99.999.860,00				0	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	8,93		(Kawasan Kumuh, KOTA TARA KAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			2.119.999.850,00			Masyarakat		0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR (%)	100							
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			2.119.999.850,00				0	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah RTLH yang terfasilitasi (Unit)	250		(Tersebar, KOTA TARA KAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2.119.999.850,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	100		(Tersebar, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			31.494.976.300,00			Aparatur		0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan (%)	100							
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			31.494.976.300,00				0	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun (%)	100		(Tersebar di 4 Kecamatan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			31.470.000.000,00				0	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	460		(Tersebar di 4 Kecamatan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			24.976.300,00			Masyarakat		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	0		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.499.989.800,00					0,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			4.499.989.800,00					0,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			29.990.000,00					0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

			Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100				Aparatur			Permukiman serta Pertanahan
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			29.990.000,00				0	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	100		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			29.990.000,00				0	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara )	5		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			4.450.000.000,00			Aparatur		0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan (%)	100							
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.450.000.000,00				0	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase penerima ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan (%)	100		(Kota Tarakan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.450.000.000,00				0	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah(Dokumen)	3		(Kota Tarakan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			19.999.800,00					0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

			Persentase dokumen SPL yang ditindakanjuti (%)	100				Masyarakat			Permukiman serta Pertanian
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			19.999.800,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian
			Presentase dokumen SPL yang ditindalanjuti (%)	100		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			19.999.800,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	5		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		
	J U M L A H				44.967.800.577,00					-	

Sumber Data: SIPD Kota TarakanTahun 2023

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan pada tahun 2024 mengajukan usulan sebanyak 8 (Delapan) Program dengan 14 (Empatbelas) Kegiatan dan 24 (Duapuluh empat) Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 44.967.800.577,00,- .Adapun rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam tabel 8 berikut.

Tabel 7. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan DPRKPP Kota Tarakan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA				
											TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Lingkungan yang Merata dan Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Tarakan				Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum (Persen)	xx	44.967.800.577,00					0,00	
			1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.467.810.777,00					0,00	
			1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			40.467.810.777,00					0,00	
	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan			NILAI SAKIP	xx	6.457.835.127,00					0,00	
1.			1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	6.457.835.127,00					0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)									
			1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000,00				0		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja (Dokumen)		1							(DPRKPP, KOTA TARAKAN)
			1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		
			1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.643.887.947,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu (Layanan)	2		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
			1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.243.887.947,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		
			1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			400.000.000,00			Aparatur		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	27		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0.00		
			1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			139.957.180,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana (Layanan)	5		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
			1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.996.960,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	5		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		



			1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	65.010.720,00	(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0.00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)									
			1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		86	39.999.050,00	(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)						Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		3	5.999.650,00	(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0.00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)						Aparatur			
			1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7	24.950.800,00	(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0.00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)						Aparatur			
			1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	259.000.000,00	(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia (Layanan)									
			1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	3.000.000,00	(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana		0.00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)									

									Alokasi Umum				
			1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		256.000.000,00				Aparatur		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur	0.00		
			1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		409.990.000,00						-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara (Unit)	32		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
			1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50.000.000,00						-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0.00		
			1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		250.000.000,00				Aparatur		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		(RT 27 Pamusian, Pamusian, Kec. Tarakan Tengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur	0.00		
			1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		109.990.000,00				Masyarakat		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat	0.00		
	1.2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR			Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi (%)	xx	2.259.999.490,00					0,00	

2.			1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	139.999.640,00			Aparatur		0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi (%)	100						
			1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	99.999.640,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab (%)	100	(Wilayah Terdampak, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
			1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	99.999.640,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10	(Daerah Tersebar, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		
			1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	40.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Persentase penghunian rumah khusus (%)	100	(RT.27 Pamusian, Pamusian, Kec. Tarakan Tengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
				Persentase penghunian unit kamar rusunawa (%)	43,43	(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
			1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	40.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	20	(RT.27 Pamusian, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		
4.			1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.119.999.850,00					0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

					Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR (%)	100				Masyarakat			
			1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			2.119.999.850,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Jumlah RTLH yang terfasilitasi (Unit)	250		(Tersebar, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
			1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2.119.999.850,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	100		(Tersebar, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		
	1.3	Menurunnya luas kawasan kumuh			Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	xx	254.999.860,00					0,00	
3.			1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			254.999.860,00					0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	6,87				Masyarakat			
			1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			155.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata (%)	75		(Lokasi Kumuh Kota Tarakan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
			1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			150.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1		(Lokasi Kumuh Kota Tarakan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		
			1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			5.000.000,00			Masyarakat		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1		(Lokasi Kumuh Kota Tarakan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	0.00		
			1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			99.999.860,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)	4,42		(Lokasi Kumuh Kota Tarakan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
			1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			99.999.860,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	8,93		(Kawasan Kumuh, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		
	1.4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan (%)	xx	31.494.976.300,00					0,00	
5.			1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			31.494.976.300,00			Aparatur		0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan (%)	100							
			1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			31.494.976.300,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun (%)	100		(Tersebar di 4 Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana		0		

							KOTA TARAKAN)	Alokasi Umum					
			1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian(Lokasi)	460		(Tersebar di 4 Kecamatan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00			
			1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang		24.976.300,00			Masyarakat			-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	0.00			
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.499.989.800,00						0,00	
		2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			4.499.989.800,00						0,00	
	1.5	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan			Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan (%)	xx	29.990.000,00					0,00	
1.			2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		29.990.000,00						0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100				Aparatur				
			2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		29.990.000,00						-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	100		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0			
			2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		29.990.000,00						-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara )	5		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		
	1.6	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan			Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan (%)	xx	4.450.000.000,00					0,00	
2.			2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			4.450.000.000,00			Aparatur		0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan (%)	100							
			2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.450.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Persentase penerima ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan (%)	100		(Kota Tarakan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
			2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.450.000.000,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	3		(Kota Tarakan, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		
	1.7	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan			Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti (%)	xx	19.999.800,00					0,00	
3.			2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			19.999.800,00			Masyarakat		0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti (%)	100							
			2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			19.999.800,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

					Presentase dokumen SPL yang ditindalanjuti (%)	100		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
			2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			19.999.800,00					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	5		(DPRKPP, KOTA TARAKAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.00		
			J U M L A H				44.967.800.577,00					-	

Sumber Data: SIPD Kota TarakanTahun 2023



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-5 periode Renstra 2019-2024. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Tarakan dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan OPD tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi kota Tarakan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Tarakan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Tarakan, September 2023  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA  
PERTANAHAN

**Ir. EDY SUSANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19660816 199803 1 005